KOMITMEN 17.

AKSESIBILITAS DAN AKUNTABILITAS PROSES PERADILAN DI INDONESIA

<p>INSTITUSI PENGUSUL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan 4. Yayasan Layanan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 5. Indonesia Corruption Watch (ICW) 		
<p>KATEGORI USULAN: MELANJUTKAN</p>		
<p>USULAN PROGRAM</p>		
<p>Stakeholder Pelaksana:</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Agung (MA) 2. Kejaksaan 3. Kepolisian
<p>Judul Komitmen:</p>	<p>:</p>	<p>Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia</p>
<p>Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini</p>	<p>:</p>	<p>Ketika berhadapan dengan hukum, berbagai hambatan dapat ditemui oleh pencari keadilan. Berbagai hambatan yang dapat ditemui dapat berupa adanya praktik kekerasan, diskriminasi, reviktimisasi maupun pungutan liar dalam proses hukum oleh aparat, tidak dapat diaksesnya proses hukum oleh masyarakat, hingga tidak diperolehnya keadilan yang dibutuhkan melalui proses hukum. Hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa masih ditemui 18% masyarakat yang dimintai uang di luar prosedur, 3% masyarakat memperoleh kekerasan fisik, dan 18% mengalami ancaman verbal/psikis selama proses hukum dari aparat di mekanisme formal. Bahkan bagi kelompok rentan dalam mengakses keadilan melalui proses hukum ini semakin terhambat</p>

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

		<p>misalnya kelompok disabilitas yang tidak memperoleh akomodasi yang layak dalam mengakses proses hukum, perempuan berhadapan dengan hukum yang minim pendampingan selama proses hukum hingga anak yang cenderung diabaikan kondisi dan kebutuhannya ketika harus berhadapan dengan hukum.</p> <p>Hambatan ditemui tidak hanya dalam proses hukum namun juga saat mengakses institusi hukum untuk memperoleh keadilan yang dibutuhkan oleh pencari keadilan. Hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 turut menunjukkan bahwa terdapat 10.8% masyarakat yang tidak tahu cara mengakses mekanisme penyelesaian masalah hukum. Apalagi ketika masa Covid-19, hambatan untuk mengakses mekanisme penyelesaian permasalahan hukum semakin dialami oleh pencari keadilan. Di mana untuk mengatasi hambatan akses keadilan selama Covid-19, pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum, pendampingan maupun penyedia layanan pendukung lainnya beradaptasi dengan membentuk kanal-kanal <i>online</i> yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Namun, sejauh mana implementasi dari upaya-upaya untuk mendorong adanya aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan masih perlu dilihat kembali.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya</p>	<p>:</p>	<p>Mendorong kajian dan regulasi yang dapat mendukung aksesibilitas dan akuntabilitas di proses peradilan</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik</p>	<p>:</p>	<p>Adanya kajian dan jaminan regulasi yang dapat mendukung aksesibilitas dan akuntabilitas di proses peradilan dapat mendorong akses masyarakat untuk ke keadilan yang dibutuhkannya di setiap tahapan proses peradilan. Hal ini juga dapat menjadi acuan untuk perbaikan proses</p>

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

		peradilan terlebih dengan adanya Covid-19 yang cenderung merubah tatanan di masyarakat.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	Adanya kajian dan jaminan regulasi yang dapat mendukung aksesibilitas dan akuntabilitas di proses peradilan ini juga sekaligus menjadi implementasi dari prinsip Open Government Indonesia, khususnya prinsip partisipatif dan inklusif. Proses hukum yang dapat dipahami dan diakses oleh seluruh kalangan masyarakat pencari keadilan merupakan bentuk upaya pencapaian asas partisipatif dan inklusivitas.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	Komitmen ini sekaligus memiliki relevansi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam salah satu agenda pembangunan yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik di mana salah satu targetnya adalah terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan. Di mana salah satu strateginya adalah penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan. Komitmen ini juga akan mendukung SDGs Goal 16.3 yakni mendorong negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua.
Penerima Manfaat	:	Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Advokat, pencari keadilan
Informasi Tambahan	:	-

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

Sumber Dana Pengusul:	:	Sebagian indikator capaian sudah ada donor namun sisanya akan diupayakan kerjasama dengan mitra pembangunan lain	
Indikator Capaian dengan Target Terukur	:	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum		Januari 2023	Desember 2024
Adanya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum		Januari 2023	Desember 2024
Adanya kajian dan diseminasi implementasi digitalisasi proses peradilan		Januari 2023	Desember 2024
Adanya kajian akuntabilitas dan transparansi kinerja APH dalam proses peradilan		Januari 2023	Desember 2024
Informasi Kontak			
Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Indonesia Judicial Research Society (IJRS); Asosiasi LBH APIK Indonesia; dan ICW	
Departemen / Jabatan	:		

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

Email	:	office@ijrs.or.id / asosiasilbhapik@gmail.com / icw@antikorupsi.org
Nomor Handphone	:	